

**2023**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP )



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja 2021-2026 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-03 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	3
1.4 Landasan Hukum .....	4
1.5 Sistematika .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1 Rencana Strategis .....	1
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	2
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	7
3.2 Realisasi Anggaran .....	25
3.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	25
BAB IV PENUTUP .....	35
DAFTAR LAMPIRAN .....	36



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep .....	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.....	6
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.....	6
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 .....	6
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 .....	6
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 .....	6
Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 .....	6
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 2023 .....	6
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	6
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	6
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi.....	6
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	6
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .....	6
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	6
Tabel 3.9 Perbandinagn Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	6
Tabel 3.10 Perbandinagn Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	6



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, bidang Perhubungan, dan bidang Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 tergolong dalam Dinas tipe A yang mempunyai 4 (empat) Bidang dan 3 UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program kerja sekretariat, rencana program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, hukum dan organisasi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, meliputi urusan rumah tangga,

- kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - d. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
  - e. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta perumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang perumahan rakyat dan permukiman, bidang perhubungan dan bidang pertanahan;
  - f. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang lalu lintas dan angkutan;
  - g. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang prasarana dan keselamatan transportasi;
  - h. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - i. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang pertanahan;
  - j. Penetapan kebijakan teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - k. Penetapan kebijakan teknis Perhubungan;
  - l. Penetapan kebijakan teknis Pertanahan;
  - m. penetapan kebijakan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
  - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep.



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep

### 1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka pemukiman kumuh;
2. Masih minimnya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan;
3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau;

4. Masih minimnya penyelesaian kasus sengketa status tanah pemerintah dan masyarakat atas kepastian status hukum;
5. Masih minimnya status legalitas aset tanah pemerintah daerah;
6. Menurunnya rasio kelengkapan fasilitas jalan dengan kebutuhan jaringan jalan untuk kendaraan umum;
7. Menurunnya tingkat pelayanan sarana lalu lintas akibat bertambahnya jumlah kendaraan umum (kekuatan struktur, panjang dan lebar jalan);
8. Belum optimalnya pengelolaan sarana angkutan;
9. Keterbatasan dan rendahnya tenaga yang mempunyai kompetensi khusus/keahlian teknik;
10. Terbatasnya sarana prasarana/fasilitas uji kendaraan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
2. Memenuhi kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan;
3. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni;
4. Menyelesaikan kasus sengketa status tanah pemerintah dan masyarakat atas kepastian status hukum;
5. Menyelesaikan ganti rugi dan santunan tanah;
6. Menyusun legalitas aset tanah pemerintah daerah;
7. Melakukan penyediaan dan pemeliharaan/rehabilitasi perlengkapan jalan (PJU, rambu, traffic light, marka);
8. Melakukan pemeliharaan dan kalibrasi sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
9. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jaringan jalan kabupaten;

10. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi tambat labuh/dermaga/pelabuhan.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### **1.5 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep 2023 adalah :

**BAB I        PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi efektif dan efisien.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas/Badan/Kecamatan /Sekretariat Kabupaten dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan visi pembangunan daerah yaitu SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA yang mempunyai makna sebagai berikut.

- **UNGGUL** dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.
- **MANDIRI** bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/*stakeholders* yang lain.
- **SEJAHTERA** mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

## 2. Misi

Misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah seperti dimaksud di atas telah dirumuskan misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Berikut ini penjabaran misi prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep.

- 1) Membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat.
- 4) Melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan berkearifan lokal.
- 5) Memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep adalah **Misi kelima** yaitu; **“Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang antara Daratan dan Kepulauan”**.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun **Misi kelima** memiliki tujuan yaitu **“Meningkatkan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Pembanguann Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”** dan sasarannya adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Merata”**, dan **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut tujuan dan sasaran beserta

indikator dan target pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep mengacu pada **Misi kelima** :

**Tabel 2.1** Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata		a. Rasio pemukiman layak huni	0,967	0,976	0,985	0,991	1
			b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,889	0,913	0,94	0,967	1
		1.1 Meningkatkan kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	70%	71%	73%	75%	77%
			1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	38,25%	53,68%	69,12%	84,56%	100%
		1.2 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	51,08	59,47	68,32	79,37	90,42
		1.3 Meningkatkan Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2** Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	Rasio	Perbandingan luas permukiman layak huni terhadap luas permukiman keseluruhan	Luas permukiman layak huni (:) luas wilayah permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana prasarana perhubungan yang ada (:) jumlah kebutuhan sarana prasarana perhubungan	
1.1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	%	Perbandingan jumlah realisasi tersedianya infrastruktur permukiman terhadap jumlah kebutuhan standar pemenuhan infrastruktur permukiman	Jumlah realisasi tersedianya infrastruktur permukiman (:) jumlah kebutuhan standar pemenuhan infrastruktur permukiman (x) 100%	
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	Perbandingan jumlah rekomendasi luas tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang diterbitkan terhadap luas tanah yang diusulkan	Luas tanah yang direkomendasikan (:) luas kebutuhan tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum (x) 100%	
1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan	1.2 Rasio Konektivitas	Rasio	Aksesibilitas kinerja jaringan jalan yang ada	IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot	

	Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata			baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan	angkutan sungai,danau, dan penyeberangan)
1.3	Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Perbandingan jumlah realisasi kinerja terhadap target kinerja	Jumlah realisasi kinerja (:) jumlah target kinerja (x) 100%

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Keterangan :

- IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut
- IK2 (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) = (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota dikali bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut.
- Bobot trayek atau lintas :
  - a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (> 5x dalam seminggu), bobot=1
  - b. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4x dalam seminggu), bobot=0.8
  - c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (<3x dalam seminggu), bobot=0.5
- Bobot angkutan jalan atau sungai, danau, dan penyeberangan :
  - a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan, bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30
  - b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sama dengan angkutan jalan, bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50

- c. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan, bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70
- d. Wilayah yang tidak memiliki pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100

## 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

**Tabel 2.3** Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata		a. Rasio pemukiman layak huni	Rasio	0,976
			b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	0,913
		1.1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	%	71%
			1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	53,68%
		1.2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	Rasio	59,47

		1.3 Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100%
--	--	--	--	---	------

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 bulan 01 tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	Rasio	0,976
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	0,913

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	%	71%
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	53,68%
1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	Rasio	59,47
1.3	Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep:

**Tabel 2.5** Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/ Kota yang Ditangani	67,5%	3.947.798.516
1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	47.110.600

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	50	47.110.600
1.04.03.2.03	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Jumlah luas lahan yang dilakukan Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1,6</b>	<b>3.900.687.916</b>
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	164	3.900.687.916
1.04.05	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>	<b>15,44%</b>	<b>238.878.266</b>
1.04.05.2.01	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Jumlah luasan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</b>	<b>10000</b>	<b>238.878.266</b>
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	193.740.266
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	45.138.000
2.10.04	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>100%</b>	<b>290.043.100</b>
2.10.04.2.01	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis kasus yang ditangani</b>	<b>1</b>	<b>290.043.100</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	290.043.100
2.10.05	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan</b>	90%	2.585.424.901
2.10.05.2.01	<b>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Masalah Ganti Rugi yang Diselesaikan</b>	1	2.585.424.901
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	2.585.424.901
2.10.08	<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>Persentase Tanah Kosong Pemerintah yang Dikelola</b>	40%	44.750.600
2.10.08.2.02	<b>Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang Diinventarisasi dan Dimanfaatkan</b>	1	44.750.600
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1	44.750.600
2.15.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	100%	14.294.991.626
2.15.01.2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	12	9.733.800

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	2.688.400
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	876.100
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	758.100
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	1	803.100
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	1	712.300
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	1.194.900
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	2.700.900
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>13</b>	<b>12.363.122.589</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	114	12.331.086.324
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	2.888.900
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	29.147.365

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.15.01.2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah</b>	<b>4</b>	<b>2.153.650</b>
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	2.153.650
2.15.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>1</b>	<b>98.908.826</b>
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	98.908.826
2.15.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>110</b>	<b>623.522.638</b>
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	10.693.500
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	12.455.660
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	304.245.118
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	38.974.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	146.399.360
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	110.755.000
2.15.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>90</b>	<b>50.932.350</b>
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	50.932.350
2.15.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>2</b>	<b>751.044.695</b>

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	471.150.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	279.894.695
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>69</b>	<b>395.573.078</b>
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	312.751.425
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	31.000.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2	51.821.653
<b>2.15.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>a. Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan</b>	<b>60%</b>	<b>667.505.509</b>
		<b>b. Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan</b>	<b>30</b>	<b>19.902.841.580</b>
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pemenuhan Perlengkapan Jalan</b>	<b>5</b>	<b>18.022.158.295</b>
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	123	199.999.939
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3600	17.822.158.356
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kendaraan yang diuji berkala</b>	<b>82,5%</b>	<b>503.705.509</b>
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	8000	112.836.259
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala	6000	185.499.300

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Berkala Kendaraan Bermotor	kendaraan bermotor		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	12	205.369.950
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>30</b>	<b>1.862.076.485</b>
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	6	1.656.665.375
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	37	153.740.110
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	51.671.000
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Persetujuan Andalalin</b>	<b>1</b>	<b>18.606.800</b>
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	18.606.800
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi</b>	<b>245</b>	<b>163.800.000</b>
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	1	163.800.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan	60%	5.030.198.315
		b. Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi	75%	2.235.028.052
2.15.03.2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan	1	4.880.199.185
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	4.880.199.185
2.15.03.2.08	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Izin yang terfasilitasi	1	149.999.130
2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1	149.999.130
2.15.03.2.12	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional	3	2.235.028.052
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	738.519.297

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	3	1.072.111.683
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	12	424.397.072

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6** Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	Rasio	0,976
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	0,913
1.1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	%	71%
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	53,68%
1.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	Rasio	59,47
1.3	Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa	1.3 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan	%	100%

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Kantor		

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7** Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/ Kota yang Ditangani	67,5%	5.434.048.516
1.04.03. 2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	47.110.600
1.04.03. 2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	50	47.110.600
1.04.03. 2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luas lahan yang dilakukan Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,6	5.386.937.916
1.04.03. 2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	240	5.386.937.916
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	15,44%	238.866.378
1.04.05. 2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah luasan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	10000	238.866.378
1.04.05. 2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang	1	193.728.378

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		Fungsi Hunian		
1.04.05. 2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	45.138.000
<b>2.10.04</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>100%</b>	<b>270.743.100</b>
<b>2.10.04. 2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis kasus yang ditangani</b>	<b>1</b>	<b>270.743.100</b>
2.10.04. 2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	270.743.100
<b>2.10.05</b>	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan</b>	<b>90%</b>	<b>7.673.382.545</b>
<b>2.10.05. 2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Masalah Ganti Rugi yang Diselesaikan</b>	<b>1</b>	<b>7.673.382.545</b>
2.10.05. 2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	7.673.382.545
<b>2.10.08</b>	<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>Persentase Tanah Kosong Pemerintah yang Dikelola</b>	<b>40%</b>	<b>44.750.600</b>
<b>2.10.08. 2.02</b>	<b>Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang Diinventarisasi dan Dimanfaatkan</b>	<b>1</b>	<b>44.750.600</b>
2.10.08. 2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1	44.750.600
<b>2.15.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>15.750.237.701</b>
<b>2.15.01. 2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>	<b>12</b>	<b>9.733.800</b>

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.15.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	2.688.400
2.15.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	876.100
2.15.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	758.100
2.15.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	1	803.100
2.15.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	1	712.300
2.15.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	1.194.900
2.15.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	2.700.900
<b>2.15.01. 2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>13</b>	<b>12.778.506.775</b>
2.15.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	114	12.749.428.686
2.15.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	2.888.900
2.15.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	26.189.189
<b>2.15.01. 2.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang</b>	<b>4</b>	<b>2.153.650</b>

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>milik daerah</b>		
2.15.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	2.153.650
<b>2.15.01. 2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>1</b>	<b>164.708.770</b>
2.15.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	154.708.770
2.15.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	10.000.000
<b>2.15.01. 2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>110</b>	<b>885.793.952</b>
2.15.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	10.693.500
2.15.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	131.316.102
2.15.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	356.017.990
2.15.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	38.974.000
2.15.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	170.149.360
2.15.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	178.643.000
<b>2.15.01. 2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>117</b>	<b>541.678.287</b>
2.15.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	435.117.225
2.15.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111	76.699.890
2.15.01. 2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	29.861.172

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>2</b>	<b>751.044.695</b>
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	471.150.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	279.894.695
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>69</b>	<b>616.617.772</b>
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	415.041.889
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	56.276.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	145.299.883
2.15.02	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>a. Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan</b>	<b>60%</b>	<b>734.271.807</b>
		<b>b. Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan</b>	<b>30</b>	<b>22.981.017.429</b>
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pemenuhan Perlengkapan Jalan</b>	<b>5</b>	<b>21.014.810.400</b>
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	13	199.999.939
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4424	20.814.810.461
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kendaraan yang diuji berkala</b>	<b>82,5%</b>	<b>570.471.807</b>
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	8000	101.003.557
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	2000	85.499.300

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.15.02. 2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	13	383.968.950
<b>2.15.02. 2.06</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>30</b>	<b>1.947.600.229</b>
2.15.02. 2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	6	1.511.714.778
2.15.02. 2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	37	404.074.451
2.15.02. 2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	31.811.000
<b>2.15.02. 2.07</b>	<b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Persetujuan Andalalin</b>	<b>1</b>	<b>18.606.800</b>
2.15.02. 2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	18.606.800
<b>2.15.02. 2.09</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi</b>	<b>245</b>	<b>163.800.000</b>
2.15.02. 2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	163.800.000
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan	60%	3.811.807.365
		b. Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi	75%	2.820.235.859

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.15.03. 2.07	<b>Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan</b>	<b>1</b>	<b>3.550.314.285</b>
2.15.03. 2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	3.550.314.285
2.15.03. 2.08	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</b>	<b>Jumlah Izin yang terfasilitasi</b>	<b>1</b>	<b>261.493.080</b>
2.15.03. 2.08.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1	261.493.080
2.15.03. 2.12	<b>Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional</b>	<b>3</b>	<b>2.820.235.859</b>
2.15.03. 2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2	1.038.512.358
2.15.03. 2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	5	1.401.699.061
2.15.03. 2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	12	380.024.440
2.10.04	<b>Program Pengelolaan Penerbangan</b>	<b>Persentase izin yang terfasilitasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
2.10.04. 2.01	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>	<b>Jumlah Izin yang terfasilitasi</b>	<b>1</b>	<b>250.000.000</b>

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
2.10.04. 2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1	250.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 (setelah perubahan)



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan evaluasi kinerja dan anggaran melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan

hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Pengkategorian Pencapaian Kinerja

No.	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata Capaian %
1.	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2.	Tinggi	$76 \leq 90$
3.	Sedang	$66 \leq 75$
4.	Rendah	$51 \leq 65$
5.	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja

utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2** Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	0,976	0,898	92,01 %	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,913	0,893	97,81 %	Sangat Tinggi	
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	71%	69%	97,18%	Sangat Tinggi	
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	53,68%	45%	83,83%	Tinggi	
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	59,47	59,47	100%	Sangat Tinggi	
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Pemerintahan Daerah						

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	0,967	0,872	90,18%	0,976	0,898	92,01%
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,913	0,881	96,49%	0,94	0,893	97,81%
1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	70%	65%	92,86%	71%	69%	97,18%
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	38,25%	35%	91,5%	53,68%	45%	83,83%
1.2	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	51,08	51,08	100%	59,47	59,47	100%
1.3	Sasaran 3 : Meningkatkan Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4** Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	0,898	1	89,8%
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,893	1	89,3%
1.1	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	69%	77%	89,61%
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	45%	100%	45%
1.2	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	59,47	90,42	65,77%
1.3	Sasaran 3 : Meningkatkan Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5** Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian %
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	0,898	Tidak Ada	Tidak Ada
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	0,893	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian %
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	69%	Tidak Ada	Tidak Ada
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	45%	Tidak Ada	Tidak Ada
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	59,47	Tidak Ada	Tidak Ada
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dengan Realisasi Nasional yang tersaji pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator yang digunakan merupakan indikator yang diukur secara regional dan tidak diukur secara nasional, sehingga tidak ada sumber data yang dapat dibandingkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6** Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capai an %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/ Kota yang Ditangani	67,5 %	65%	96,3%		
1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	1	100%		

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.04.03.2.0 1.02	Penyusunan dan/ atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	50	50	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
1.04.03.2.0 3	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Jumlah luas lahan yang dilakukan Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>100%</b>		
1.04.03.2.0 3.02	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	240	224	93,33 %	Dari rencana target 240 unit rumah terbangun, hanya tersisa 224 unit rumah yang terbangun setelah lolos verifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan kesanggupan dalam berswadaya	
1.04.05	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>	<b>15,44 %</b>	<b>15%</b>	<b>97,15 %</b>		
1.04.05.2.0 1	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Jumlah luasan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100%</b>		
1.04.05.2.0 1.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	1	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
1.04.05.2.0 1.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	1	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.10.04	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2.10.04.2.0 1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kasus yang ditangani	1	1	100%		
2.10.04.2.0 1.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan	90%	45%	50%		
2.10.05.2.0 1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Ganti Rugi yang Diselesaikan	1	1	100%		
2.10.05.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	5	83,33 %	Pengadaan tanah (Bundaran Pintu Masuk Kota di Kec. Pragaan) tidak terealisasi karena tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah	
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong Pemerintah yang Dikelola	40%	40%	100%		
2.10.08.2.0 2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang Diinventarisasi dan Dimanfaatkan	1	1	100%		
2.10.08.2.0 2.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1	1	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100%	100%		
2.15.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	12	12	100%		

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capai an %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2.15.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	3	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	6	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	13	13	100%		
2.15.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	114	114	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2.15.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD	4	4	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	1	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
<b>2.15.01.2.0 3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>		
2.15.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2	2	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
<b>2.15.01.2.0 5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>		
2.15.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	4	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	2	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
<b>2.15.01.2.0 6</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>		
2.15.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	4	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	5	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	4	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capai an %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2.15.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	2	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 7	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>		
2.15.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111	111	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 7.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	4	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 8	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>		
2.15.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 9	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>		

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
2.15.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	35	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	32	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	3	100%	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan RAK	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan	60%	60%	100%		
		b. Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	30	30	100%		
2.15.02.2.0 2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemenuhan Perlengkapan Jalan	5	5	100%		
2.15.02.2.0 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	13	13	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.0 2.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4424	4424	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.0 5	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang diuji berkala	82,5 %	80%	96,97 %		
2.15.02.2.0 5.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	4000	3771	94,28 %	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.0 5.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	2000	2000	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.0 5.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang	13	13	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		terpelihara				dengan pihak terkait	
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	30	30	100%		
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	6	6	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	37	37	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2	2	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Persetujuan Andalalin	1	1	100%		
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	6	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi	255	245	96,08 %		
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1	1	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan	60%	60%	100%		

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capai an %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		<b>b. Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi</b>	75%	70%	93,33 %		
2.15.03.2.07	<b>Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan</b>	1	1	1		
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12	12	1	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.03.2.08	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</b>	<b>Jumlah Izin yang terfasilitasi</b>	1	1	1		
2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1	1	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.03.2.12	<b>Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional</b>	3	3	100%		
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	2	2	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	5	5	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait	
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	12	12	100%	Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan /Kegagalan terkait	Solusi yang Dilakukan
2.10.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase izin yang terfasilitasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	100 %	0	0%		
2.10.04.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Izin yang terfasilitasi	1	0	0%		
2.10.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1	0	0%	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter tidak terealisasi karena pembangunan fisik air strip di Masalembu belum selesai sehingga uji coba penerbangan tidak terlaksana	

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
	Tujuan : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	a. Rasio pemukiman layak huni	92,01 %	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kab/ Kota yang Ditangani	96,3%	
		b. Indeks Infrastruktur Perhubungan	97,81 %				

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	1.1a Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman	97,18 %	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	
		1.1b Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	83,83 %				
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	1.2 Rasio Konektivitas	100%	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	100%	Menunjang
	Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.3 Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan lahan yang dilakukan Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	93,33 %	Menunjang
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	97,15 %	
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah luasan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	100%	

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	Menunjang
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100%	Menunjang
				<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>100%</b>	
				<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis kasus yang ditangani</b>	<b>100%</b>	
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan</b>	<b>50%</b>	
				<b>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah</b>	<b>Jumlah Masalah Ganti Rugi yang Diselesaikan</b>	<b>100%</b>	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Daerah Kabupaten/Kota			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83%	Menunjang
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong Pemerintah yang Dikelola	100%	
				Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Tanah Kosong yang Diinventarisasi dan Dimanfaatkan	100%	
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	100%	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</b>	100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%	Menunjang
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100%	Menunjang
				<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah</b>	100%	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	100%	Menunjang
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</b>	100%	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	Menunjang
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</b>	100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan</b>	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100%	Menunjang
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa yang disediakan</b>	<b>100%</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100%</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan	100%	
					b. Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	100%	
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah pemenuhan Perlengkapan Jalan	100%	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	100%	Menunjang
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang diuji berkala	96,97 %	
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	94,28 %	Menunjang
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	100%	Menunjang
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	Menunjang
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Persetujuan Andalalin	100%	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi	96%	
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang
				Program Pengelolaan Pelayaran	a. Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan	100%	
					b. Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi	93,33 %	
				Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan	100%	
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas	100%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
				<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</b>	<b>Jumlah Izin yang terfasilitasi</b>	100%	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	100%	Menunjang
				<b>Kegiatan Pembangunan , Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional</b>	100%	
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	100%	Menunjang
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	100%	Menunjang
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan	100%	Menunjang

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang
				Lokal	pengumpulan lokal		
				Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase izin yang terfasilitasi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten	0%	
				Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Izin yang terfasilitasi	0%	
				Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	0%	Tidak Menunjang

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	5.434.048.516	5.108.586.071	94,01%
1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	47.110.600	45.428.300	96,43%
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	47.110.600	45.428.300	96,43%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.386.937.916	5.063.157.771	93,99%
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.386.937.916	5.063.157.771	93,99%
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	238.866.378	237.260.150	99,33%
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	238.866.378	237.260.150	99,33%
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	193.728.378	193.376.650	99,82%
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	45.138.000	43.883.500	97,22%
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	270.743.100	240.295.600	88,75%
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.743.100	240.295.600	88,75%
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.743.100	240.295.600	88,75%
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	7.673.382.545	3.126.564.583	40,75%
2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.673.382.545	3.126.564.583	40,75%
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.673.382.545	3.126.564.583	40,75%
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	44.750.600	27.860.000	62,26%
2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	44.750.600	27.860.000	62,26%
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	44.750.600	27.860.000	62,26%
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.750.237.701	13.569.396.336	86,15%
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.733.800	9.621.400	98,85%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.688.400	2.672.000	99,39%
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	876.100	855.000	97,59%
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	758.100	739.500	97,55%
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	803.100	787.000	98,00%
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	712.300	696.000	97,71%
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.194.900	1.192.000	99,76%
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.700.900	2.679.900	99,22%
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.778.506.775</b>	<b>10.812.195.983</b>	<b>84,61%</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.749.428.686	10.783.144.483	84,58%
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.888.900	2.874.600	99,51%
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.189.189	26.176.900	99,95%
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.153.650</b>	<b>2.151.250</b>	<b>99,89%</b>
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.153.650	2.151.250	99,89%
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>164.708.770</b>	<b>163.762.850</b>	<b>99,43%</b>
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	154.708.770	154.052.850	99,58%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	9.710.000	97,10%
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>885.793.952</b>	<b>849.729.234</b>	<b>95,93%</b>
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.693.500	10.682.000	99,89%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.316.102	130.911.350	99,69%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	356.017.990	323.255.800	90,80%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.974.000	38.832.500	99,64%
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	170.149.360	167.588.451	98,49%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.643.000	178.459.133	99,90%
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>541.678.287</b>	<b>481.976.550</b>	<b>88,98%</b>
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.117.225	376.869.000	86,61%
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	76.699.890	75.552.150	98,50%
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.861.172	29.555.400	98,98%
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>751.044.695</b>	<b>657.357.247</b>	<b>87,53%</b>
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	471.150.000	378.754.795	80,39%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.894.695	278.602.452	99,54%
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>616.617.772</b>	<b>592.601.822</b>	<b>96,11%</b>
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.041.889	392.103.514	94,47%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.276.000	55.267.000	98,21%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.299.883	145.231.308	99,95%
<b>2.15.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>734.271.807</b>	<b>723.351.621</b>	<b>98,51%</b>
		<b>22.981.017.429</b>	<b>22.696.576.251</b>	<b>98,76%</b>
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>21.014.810.400</b>	<b>20.759.417.716</b>	<b>98,78%</b>
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	199.999.939	187.658.790	93,83%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	20.814.810.461	20.571.758.926	98,83%
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>570.471.807</b>	<b>559.904.121</b>	<b>98,15%</b>

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	101.003.557	98.974.900	97,99%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	85.499.300	78.700.001	92,05%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	383.968.950	382.229.220	99,55%
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.947.600.229</b>	<b>1.918.641.382</b>	<b>98,51%</b>
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1.511.714.778	1.486.616.800	98,34%
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	404.074.451	400.738.856	99,17%
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	31.811.000	31.285.726	98,35%
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>18.606.800</b>	<b>18.517.153</b>	<b>99,52%</b>
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	18.606.800	18.517.153	99,52%
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>163.800.000</b>	<b>163.447.500</b>	<b>99,78%</b>
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	163.800.000	163.447.500	99,78%
<b>2.15.03</b>	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	<b>3.811.807.365</b>	<b>3.405.398.001</b>	<b>89,34%</b>
		<b>2.820.235.859</b>	<b>2.674.134.005</b>	<b>94,82%</b>
<b>2.15.03.2.07</b>	<b>Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>3.550.314.285</b>	<b>3.144.304.566</b>	<b>88,56%</b>
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	3.550.314.285	3.144.304.566	88,56%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
	Kabupaten/ Kota			
<b>2.15.03.2.08</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</b>	<b>261.493.080</b>	<b>261.093.435</b>	<b>99,85%</b>
2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	261.493.080	261.093.435	99,85%
<b>2.15.03.2.12</b>	<b>Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>2.820.235.859</b>	<b>2.674.134.005</b>	<b>94,82%</b>
2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.038.512.358	1.013.847.576	97,62%
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.401.699.061	1.280.393.929	91,35%
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	380.024.440	379.892.500	99,97%
<b>2.10.04</b>	<b>Program Pengelolaan Penerbangan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>99.970.484</b>	<b>39,99%</b>
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>	<b>250.000.000</b>	<b>99.970.484</b>	<b>39,99%</b>
2.10.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	250.000.000	99.970.484	39,99%

### 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9** Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan	0,976	0,898	92,01%	13.661.791.139	8.740.566.404	63,98%	
		0,913	0,893	97,81%	46.347.570.161	43.168.826.698	93,14%	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
	yang berkualitas dan merata							
1.1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang berkualitas dan merata	71%	69%	97,18%	5.672.914.894	5.345.846.221	94,23%	
		53,68%	45%	83,83%	7.988.876.245	3.394.720.183	42,49%	
1.2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata	59,47	59,47	100%	30.597.332.460	29.599.430.362	96,74%	
1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Penyediaan Barang/Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	15.750.237.701	13.569.396.336	86,15%	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10** Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	67,5%	65%	96,3%	5.434.048.516	5.108.586.071	94,01%	2,29%
1.04.03.2.0.1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	1	100%	47.110.600	45.428.300	96,43%	3,57%
1.04.03.2.0.1.02	Penyusunan dan/ atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan	50	50	100%	47.110.600	45.428.300	96,43%	3,57%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh							
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,6	1,6	100%	5.386.937.916	5.063.157.771	93,99%	6,01%
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	240	224	93,3%	5.386.937.916	5.063.157.771	93,99%	-0,66%
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	15,44%	15%	97,2%	238.866.378	237.260.150	99,33%	-2,18%
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10000	10000	100%	238.866.378	237.260.150	99,33%	0,67%
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1	1	100%	193.728.378	193.376.650	99,82%	0,18%
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1	1	100%	45.138.000	43.883.500	97,22%	2,78%
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100%	270.743.100	240.295.600	88,75%	11,25%
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	270.743.100	240.295.600	88,75%	11,25%
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	100%	270.743.100	240.295.600	88,75%	11,25%
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	90%	45%	50%	7.673.382.545	3.126.564.583	40,75%	9,25%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	7.673.382.545	3.126.564.583	40,75 %	59,25 %
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	5	83,33 %	7.673.382.545	3.126.564.583	40,75 %	42,59 %
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	40%	40%	100%	44.750.600	27.860.000	62,26 %	37,74 %
2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1	1	100%	44.750.600	27.860.000	62,26 %	37,74 %
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1	1	100%	44.750.600	27.860.000	62,26 %	37,74 %
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	15.750.237.701	13.569.396.336	86,15 %	13,85 %
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	100%	9.733.800	9.621.400	98,85 %	1,15%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100%	2.688.400	2.672.000	99,39 %	0,61%
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%	876.100	855.000	97,59 %	2,41%
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%	758.100	739.500	97,55 %	2,45%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2.15.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100%	803.100	787.000	98,00 %	2,00%
2.15.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%	712.300	696.000	97,71 %	2,29%
2.15.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%	1.194.900	1.192.000	99,76 %	0,24%
2.15.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100%	2.700.900	2.679.900	99,22 %	0,78%
<b>2.15.01.2.0 2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>12.778.506.775</b>	<b>10.812.195.983</b>	<b>84,61 %</b>	<b>15,39 %</b>
2.15.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114	114	100%	12.749.428.686	10.783.144.483	84,58 %	15,42 %
2.15.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	4	100%	2.888.900	2.874.600	99,51 %	0,49%
2.15.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100%	26.189.189	26.176.900	99,95 %	0,05%
<b>2.15.01.2.0 3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2.153.650</b>	<b>2.151.250</b>	<b>99,89 %</b>	<b>0,11%</b>
2.15.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100%	2.153.650	2.151.250	99,89 %	0,11%
<b>2.15.01.2.0 5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>164.708.770</b>	<b>163.762.850</b>	<b>99,43 %</b>	<b>0,57%</b>
2.15.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	4	100%	154.708.770	154.052.850	99,58 %	0,42%
2.15.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	2	2	100%	10.000.000	9.710.000	97,10 %	2,90%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	dan Fungsi							
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100%</b>	<b>885.793.952</b>	<b>849.729.234</b>	<b>95,93%</b>	<b>4,07%</b>
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	4	100%	10.693.500	10.682.000	99,89%	0,11%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	5	100%	131.316.102	130.911.350	99,69%	0,31%
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	4	100%	356.017.990	323.255.800	90,80%	9,20%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	3	100%	38.974.000	38.832.500	99,64%	0,36%
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2	100%	170.149.360	167.588.451	98,49%	1,51%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	178.643.000	178.459.133	99,90%	0,10%
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>	<b>541.678.287</b>	<b>481.976.550</b>	<b>88,98%</b>	<b>11,02%</b>
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	100%	435.117.225	376.869.000	86,61%	13,39%
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	111	111	100%	76.699.890	75.552.150	98,50%	1,50%
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	4	100%	29.861.172	29.555.400	98,98%	1,02%
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>751.044.695</b>	<b>657.357.247</b>	<b>87,53%</b>	<b>12,47%</b>
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	24	100%	471.150.000	378.754.795	80,39%	19,61%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa	1	1	100%	279.894.695	278.602.452	99,54%	0,46%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
8.04	Pelayanan Umum Kantor						%	
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69	69	100%	616.617.772	592.601.822	96,11%	3,89%
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	35	100%	415.041.889	392.103.514	94,47%	5,53%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32	32	100%	56.276.000	55.267.000	98,21%	1,79%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	100%	145.299.883	145.231.308	99,95%	0,05%
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	60%	60%	100%	734.271.807	723.351.621	98,51%	1,49%
		30	30	100%	22.981.017.429	22.696.576.251	98,76%	1,24%
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	5	5	100%	21.014.810.400	20.759.417.716	98,78%	1,22%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	13	13	100%	199.999.939	187.658.790	93,83%	6,17%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4424	4424	100%	20.814.810.461	20.571.758.926	98,83%	1,17%
2.15.02.2.02.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	82,5%	80%	96,97%	570.471.807	559.904.121	98,15%	-1,18%
2.15.02.2.02.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4000	3771	94,28%	101.003.557	98.974.900	97,99%	-3,72%
2.15.02.2.02.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	2000	2000	100%	85.499.300	78.700.001	92,05%	7,95%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Kendaraan Bermotor							
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13	13	100%	383.968.950	382.229.220	99,55%	0,45%
2.15.02.2.06	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	30	30	100%	1.947.600.229	1.918.641.382	98,51%	1,49%
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	6	6	100%	1.511.714.778	1.486.616.800	98,34%	1,66%
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	37	37	100%	404.074.451	400.738.856	99,17%	0,83%
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	2	2	100%	31.811.000	31.285.726	98,35%	1,65%
2.15.02.2.07	<b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	1	1	100%	18.606.800	18.517.153	99,52%	0,48%
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	6	100%	18.606.800	18.517.153	99,52%	0,48%
2.15.02.2.09	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	255	245	96%	163.800.000	163.447.500	99,78%	- 3,71%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2.15.02.2.0 9.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1	100%	100%	163.800.000	163.447.500	99,78 %	0,22%
2.15.03	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	60%	60%	100%	3.811.807.365	3.405.398.001	89,34 %	10,66 %
		75%	70%	93,33 %	2.820.235.859	2.674.134.005	94,82 %	- 1,49%
2.15.03.2.0 7	<b>Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	1	1	100%	3.550.314.285	3.144.304.566	88,56 %	11,44 %
2.15.03.2.0 7.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12	12	100%	3.550.314.285	3.144.304.566	88,56 %	11,44 %
2.15.03.2.0 8	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</b>	1	1	100%	261.493.080	261.093.435	99,85 %	0,15%
2.15.03.2.0 8.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1	1	100%	261.493.080	261.093.435	99,85 %	0,15%
2.15.03.2.1 2	<b>Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian</b>	3	3	100%	2.820.235.859	2.674.134.005	94,82 %	5,18%

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	<b>Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>							
2.15.03.2.1 2.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	2	100%	1.038.512.358	1.013.847.576	97,62 %	2,38%
2.15.03.2.1 2.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	5	100%	1.401.699.061	1.280.393.929	91,35 %	8,65%
2.15.03.2.1 2.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	12	100%	380.024.440	379.892.500	99,97 %	0,03%
<b>2.10.04</b>	<b>Program Pengelolaan Penerbangan</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>99.970.484</b>	<b>39,99 %</b>	<b>- 39,99 %</b>
<b>2.10.04.2.0 1</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>99.970.484</b>	<b>39,99 %</b>	<b>- 39,99 %</b>
2.10.04.2.0 1.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	1	0%	0%	250.000.000	99.970.484	39,99 %	- 39,99 %

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencapaian indikator kinerja sasaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2023, kami uraikan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang Berkualitas dan Merata

Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yaitu persentase peningkatan infrastruktur permukiman dan persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

1. Indikator persentase peningkatan infrastruktur permukiman memiliki target 71% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.672.914.894,- diperoleh realisasi kinerja 69% dengan capaian sebesar 97,18% dan serapan anggaran sebesar

Rp. 5.345.846.221,- dengan capaian sebesar 94,23%. Indikator ini didukung 2 (dua) Program yaitu:

a. Program Kawasan Permukiman

Program ini didukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, dimana realisasi target mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 96,43%.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dimana realisasi target mencapai 93,33% sedangkan serapan anggaran mencapai 93,99%. Target tidak tercapai dikarenakan ada beberapa target penerima bantuan yang tidak lulus verifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan kesanggupan dalam berswadaya.

b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dan Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian memiliki capaian realisasi target sebesar 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 99,82%.

Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari

Pengembang memiliki capaian realisasi target sebesar 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 97,22%.

2. Indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum memiliki target 53,68% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.988.876.245,- diperoleh realisasi kinerja 45% dengan capaian sebesar 83,83% dan serapan anggaran sebesar Rp. 3.394.720.183,- dengan capaian sebesar 42,49%. Indikator ini didukung 3 (tiga) Program yaitu:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dimana realisasi target mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 88,75%.

- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana realisasi target mencapai 83,33% sedangkan serapan anggaran mencapai 42,59%. Target tidak tercapai dikarenakan pengadaan tanah (Bundaran Pintu Masuk Kota di Kec. Pragaan) tidak terealisasi karena tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah.

- c. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong. Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan

Inventarisasi Tanah Kosong, dimana realisasi target mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 62,26%.

b) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan Merata

Sasaran ini memiliki target 59,47 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.597.332.460,- diperoleh realisasi kinerja 59,47 dengan capaian sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp. 29.599.430.362,- dengan capaian sebesar 96,74%. Indikator ini didukung 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Rata-Rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan dan Rata-Rata *Load Factor* Angkutan Jalan.

a. Indikator Rata-Rata *Load Factor* Angkutan Jalan

Indikator ini memiliki target 60% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 734.271.807,- diperoleh realisasi kinerja 60% dengan capaian sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp. 723.351.621,- dengan capaian sebesar 98,51%. Indikator ini didukung 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor didukung dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Realisasi target Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor mencapai 94,28% sedangkan serapan anggaran mencapai 97,99%. Target tidak tercapai dikarenakan masih kurangnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya uji berkala kendaraan bermotor.

Realisasi target Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 92,05%.

Realisasi target Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 99,55%.

- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dimana realisasi target mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 99,78%.

b. Indikator Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan

Indikator ini memiliki target 30 Km/Jam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.981.017.429,- diperoleh realisasi kinerja 30 Km/Jam dengan capaian sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp. 22.696.576.251,- dengan capaian sebesar 98,76%. Indikator ini didukung 3 (tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota didukung dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Realisasi target Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 93,83%.

Realisasi target Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 98,83%.

- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota didukung dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Realisasi target Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 98,34%.

Realisasi target Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 99,17%.

Realisasi target Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 98,35%.

- Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin, dimana realisasi target mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 99,52%.

## 2. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi dan Rata-Rata *Load Factor* Angkutan Penyeberangan.

a. Indikator Rata-Rata *Load Factor* Angkutan Penyeberangan

Indikator ini memiliki target 60% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.811.807.365,- diperoleh realisasi kinerja 60% dengan capaian sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp. 3.405.398.001,- dengan capaian sebesar 89,34%. Indikator ini didukung 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal.

- Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dimana realisasi target mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 88,56%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal, dimana realisasi target mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 99,85%.

b. Indikator Persentase Prasarana Pelayaran yang Dapat Berfungsi

Indikator ini memiliki target 75% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.820.235.859,- diperoleh realisasi kinerja 70% dengan capaian sebesar 93,33% dan serapan anggaran sebesar Rp. 2.674.134.005,- dengan capaian

sebesar 98,76%. Indikator ini didukung 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal, dan Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Realisasi target Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 97,62%.

Realisasi target Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 91,35%.

Realisasi target Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal mencapai 100% sedangkan serapan anggaran mencapai 99,97%.

### 3. Program Pengelolaan Penerbangan

Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter. Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter, dimana target tidak terealisasi sedangkan serapan anggaran mencapai 39,99%. Target tidak tercapai dikarenakan pembangunan fisik air strip di Masalembu belum selesai sehingga uji coba penerbangan tidak terlaksana.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2023 menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Sarana-Prasarana Perhubungan yang berkualitas dan merata terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio Permukiman Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 92,01% (kategori sangat tinggi) dan Indeks Infrastruktur Perhubungan dengan capaian kinerja sebesar 97,81% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang Berkualitas dan Merata terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Infrastruktur Permukiman dengan capaian kinerja sebesar 97,18% (kategori sangat tinggi) dan Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum dengan capaian kinerja sebesar 83,83% (kategori tinggi)

- Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Berkualitas dan Merata terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 3 Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 60.009.361.300 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 51.909.393.102, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 86,5% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 93,78%.

Hal ini dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yg tidak terealisasi sesuai target, salah satunya adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengadaan tanah (Bundaran Pintu Masuk Kota di Kec. Pragaan) tidak terealisasi karena tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah. Adapun saran yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan verifikasi di lapangan lebih tegas dan mendetail. Sedangkan tindak lanjutnya adalah menganggarkan kembali di tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan tahun 2023 diantaranya melaksanakan FGD dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait kesepakatan harga.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

*stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Sumenep, Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660129 198903 1 007



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH**
- II. MATRIKS RENSTRA**
- III. SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- IV. PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH**